

# KETAHANAN PANGAN TINGKAT RUMAH TANGGA PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Oleh: Nilam Anggar Sari

Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Kutai Kartanegara

## **Abstract:**

*Since household food security is one of the goals of economic, social and cultural development programs in Kutai Kartanegara, it is important to estimate the level of household food security. This estimation is done through various indices such as Aggregate Household Food Security Index (AHFSI). This index was first proposed by the FAO. Using this index, the present article tries to estimate the level of household food security in district Kutai Kartanegara 2015 are differentiated by urban and rural. The magnitude of the AHFSI index for 2015 is 65.67, where in urban areas it reaches 65.17 and in rural areas reaches 65.94. This means that in terms of household energy consumption on average, household food security within and relatively not much different. Since AHFSI is between 65 - 75, households in Kutai Kartanegara are on average included in the low AHFSI category, both in urban and rural areas. Households in Kutai Kartanegara in 2015 are categorized as follows: 48.59 percent are food-resistant households, 18.49 percent of vulnerable households, 1.28 percent of poor households, and 15.64 percent of food insecurity households with access to both physical and low economic access to adequate food. Percentage of food insecure households in urban areas that is more food resistant than rural areas. This is because households in urban areas have relatively good physical access and economic access compared to rural households.*

**Keywords: Household Food Security, AHFSI, Urban, Rural**

## **PENDAHULUAN**

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional (Ariani dkk, 2012). Menurut Malthus manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang menurut deret ukur (*geometric progression*, dari 2 ke 4, 8, 16, 32, dan seterusnya), sedangkan pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung (*arithmetic progression*, dari 2 ke 4, 6, 8, 10, dan seterusnya) (Mulyadi, 2003:6).

Penelitian yang dilakukan Irawan (2005) menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan di luar Jawa (132 ribu Ha per tahun) ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau Jawa (56 ribu ha per tahun). Sebesar 58,68 persen alih fungsi lahan sawah tersebut ditujukan untuk kegiatan non pertanian dan sisanya untuk kegiatan bukan sawah. Alih fungsi lahan sebagian besar untuk kegiatan pembangunan perumahan dan sarana publik.

Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi tambang dan perkebunan sawit dapat mengancam krisis pangan di masa mendatang. Di sisi lain tingkat

kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terus meningkat sangat berpengaruh terhadap kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu pangan. Data dari BPS Kukar menunjukkan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 53 ribu jiwa pada tahun 2014 menjadi 54 ribu jiwa atau setara 7.56 persen. Salah satu pemicunya yaitu adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dominan terjadi di sektor pertambangan dalam kurun dua tahun terakhir. Krisis ekonomi juga turut berkontribusi terhadap pelemahan perekonomian masyarakat sehingga pendapatan masyarakat ikut menurun. Pendapatan menjadi faktor penting dalam menentukan pengeluaran rumah tangga, termasuk pola konsumsi pangan keluarga. Apabila pendapatan meningkat, pola konsumsi akan lebih beragam sehingga konsumsi pangan yang bernilai gizi tinggi juga akan meningkat (Yudaningrum, 2011). Data dari BPS tahun 2015 tentang kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa 48,98 % dikeluarkan untuk kebutuhan pangan sedangkan 51,02% dikeluarkan untuk kebutuhan non pangan. Sedangkan pada tahun 2016, pengeluaran untuk makanan cenderung meningkat hingga mencapai 53.10 % dan non pangan menurun menjadi 46.90% (Tabel 1).

Tabel 1. Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Penduduk Selama Sebulan Menurut Klasifikasi Wilayah, 2015-2016

Klasifikasi wilayah	2015		2016	
	Rp	Persen	Rp	Persen
<b>Perkotaan</b>				
Makanan	484.618	47.18	540.809	50.78
Bukan Makanan	542.454	52.82	524.252	49.22
<b>Total</b>	<b>1.027.072</b>	<b>100</b>	<b>1.065.060</b>	<b>100</b>
<b>Pedesaan</b>				
Makanan	484.287	49.92	562.671	54.34
Bukan Makanan	485.915	50.08	472.777	45.66
<b>Total</b>	<b>970.202</b>	<b>100</b>	<b>1.035.449</b>	<b>100</b>
<b>Kota+Desa</b>				
Makanan	484.387	48,98	555.198	53.10
Bukan Makanan	504.600	51.02	490.372	46.90
<b>Total</b>	<b>988.996</b>	<b>100</b>	<b>1.045.571</b>	<b>100</b>

Sumber: Susenas 2015 2016

Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan kesejahteraan rumah tangga pada tahun 2016. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga berpenghasilan rendah. Semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa tingkat ketahanan pangan di perkotaan relatif lebih baik dibandingkan pedesaan. Sesuai teori ekonomi maka keadaan ini mengindikasikan bahwa masyarakat pedesaan masih mengutamakan konsumsi pokoknya yaitu konsumsi makanan dibandingkan bukan makanan. Sebaliknya masyarakat perkotaan mengalokasikan tambahan pendapatan untuk membeli komoditas bukan makanan (Sari, 2016).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat ketahanan pangan (*food security*) pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

### Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan yang merupakan terjemahan dari *food security* adalah terjaminnya akses pangan untuk segenap rumah tangga serta individu setiap waktu sehingga mereka dapat bekerja dan hidup sehat (Braun dkk., 1992; Suhardjo, 1996; Soetrisno, 1997). UU RI Nomor

18 Tahun 2012 menyatakan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif serta berkelanjutan. Menurut Soemarno (2010) pada dasarnya konsep ketahanan pangan terkait dengan beberapa hal seperti : ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan keterjangkauan pangan/akses terhadap pangan. Konsep ketahanan pangan paling tidak harus memenuhi lima unsur pokok, yaitu berorientasi pada kebutuhan rumah tangga dan individu, setiap bahan pangan tersedia dan mudah diakses, mengutamakan aksesibilitas baik bagi rumah tangga maupun individu secara fisik, maupun sosial-ekonomi, bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan gizi secara aman yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mampu hidup sehat dan produktif.

### Ketahanan Pangan Rumah Tangga/Keluarga

Konsep ketahanan pangan dapat diterapkan untuk menyatakan situasi pangan pada beberapa tingkatan yaitu tingkat global, nasional, regional (daerah), dan tingkat rumah tangga serta individu (Soehardjo, 1996). Sementara itu Simatupang (1999) menyatakan bahwa ketahanan pangan tingkat global, nasional, regional, komunitas lokal, rumah tangga dan individu merupakan suatu rangkaian sistem hierarkis. Tingkat ketahanan pangan yang lebih tinggi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary condition*) bagi tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah, tetapi bukan syarat yang mencukupi (*sufficient condition*). Karena tercapainya ketahanan pangan di tingkat wilayah tidak menjamin tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Hal ini ditunjukkan adanya fakta bahwa walaupun ditingkat nasional dan wilayah (provinsi) memiliki status tahan pangan terjamin, namun di wilayah tersebut masih ditemukan rumah tangga rawan pangan. Dan sebaliknya, ketahanan pangan rumah tangga akan menjadi dasar terbentuknya ketahanan pangan daerah baik di daerah atau regional.

Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga merupakan salah satu indikator ketahanan pangan (Pakpahan 1993), makin besar pangsa pengeluaran untuk pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara pangsa

pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian sebaliknya. Selain pangsa pangan, ketahanan pangan tingkat rumah tangga dapat dilihat dari kandungan gizi dalam konsumsi pangan rumah tangga. Berdasarkan norma gizi, secara garis besar konsumsi makanan yang menghasilkan tubuh yang sehat perlu mengandung unsur pangan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin/mineral dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Keseimbangan dalam mengkonsumsi berbagai jenis pangan akan mencerminkan kualitas konsumsi pangan rumah tangga. Menurut Widayakarya Pangan dan Gizi VII tahun 2004, angka kecukupan gizi di tingkat individu adalah untuk konsumsi kalori sebesar 2000 kkal/hari dan konsumsi protein sebesar 52 gram/hari. Maxwell dan Frankenberger (1992) menggabungkan pangsa pangan dan kecukupan energi untuk mengklasifikasikan ketahanan pangan rumah tangga menjadi empat kategori yaitu tahan pangan, rentan pangan, kurang pangan dan rawan pangan. Batasan yang digunakan adalah 80 persen dari standar kecukupan energi dikombinasikan dengan pangsa pengeluaran pangan > 60 persen dari total pengeluaran rumah tangga. FAO (1996) mengembangkan Aggregate Household Food Security Index (AHFSI) atau Indeks Ketahanan Pangan Agregat Tingkat Rumah tangga yang didasarkan konsumsi kalori rumah tangga.

Ketahanan pangan keluarga sebagaimana hasil rumusan *International Congress of Nutrition (ICN)* yang diselenggarakan di Roma tahun 1992 mendefinisikan bahwa: “Ketahanan pangan keluarga (*household food security*) adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari”. Dalam sidang *Committee on World Food Security* 1995 definisi tersebut diperluas dengan menambah persyaratan harus diterima oleh budaya setempat (Suhadi Purwantoro, 2009)

### Penelitian Terdahulu

E Afshoon et al pada Tahun 2016 dengan penelitian yang berjudul “Food Security Analysis in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province Case Study: Households”. Secara umum, hasil AHFSI index menunjukkan ketahanan pangan rumah tangga pada tingkat pedesaan dan perkotaan di Provinsi Koggiluyeh and Boyer Ahmad pada level yang tinggi/sangat tahan. Pada penelitian lain yang berjudul Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Selatan

oleh Anna Ellenora Nainupu dan Tri Widodo pada tahun 2013. Terjadi peningkatan persentase rumah tangga dari tahun 2008 ke tahun 2011. Dimana Variabel umur kepala rumah tangga, lama sekolah kepala rumah tangga, *dummy* pendapatan per kapita rumah tangga, *dummy* lapangan usaha kepala rumah tangga (pertanian) berpengaruh negatif terhadap kemungkinan rumah tangga mengalami rawan pangan. Variabel *dummy* pendapatan per kapita per bulan rumah tangga memberikan nilai *marginal effect* terbesar bagi kerawanan pangan pada tingkat rumah tangga di NTT.

Estimation of Food Security Situation at Household Level in Rural Areas of Punjab. Indeks AHFSI menunjukkan nilai sebesar 70,18 (antara 65 dan 75) yang berarti bahwa ketahanan pangan dikategorikan rendah (tidak tahan)

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2015 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Daerah dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan unit analisisnya adalah Rumah Tangga (RT).

### Pemodelan

Pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran untuk pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian sebaliknya.

Selain pangsa pangan, ketahanan pangan tingkat rumah tangga dapat dilihat dari kandungan gizi dalam konsumsi pangan rumah tangga. Berdasarkan norma gizi, secara garis besar konsumsi makanan yang menghasilkan tubuh yang sehat perlu mengandung unsur pangan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin/mineral dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Keseimbangan dalam mengkonsumsi berbagai jenis pangan akan mencerminkan kualitas konsumsi pangan rumah tangga. Menurut Widaya karya Pangan dan Gizi VII tahun 2004, angka kecukupan gizi di tingkat individu adalah untuk konsumsi kalori sebesar 2000 kkal/hari dan konsumsi protein sebesar 52 gram/hari.

Maxwell dan Frankenberger (1992) menggabungkan pangsa pangan dan kecukupan energi untuk mengklasifikasikan ketahanan

pangan rumah tangga menjadi empat kategori yaitu tahan pangan, rentan pangan, kurang pangan dan rawan pangan. Batasan yang digunakan adalah 80 persen dari standar kecukupan energi dikombinasikan dengan pangsa pengeluaran pangan > 60 persen dari total pengeluaran rumah tangga.

FAO (1996) mengembangkan Aggregate Household Food Security Index (AHFSI) atau Indeks Ketahanan Pangan Agregat Tingkat Rumah tangga yang didasarkan konsumsi kalori rumah tangga. Secara matematis bentuk indeks ini adalah:

$$AHFSI = 100 - [H(G + (1-G)^P) + \frac{1}{2} S \{1 - H(G + (1-G)^P)\}] 100$$

di mana:

- H : Nilai Head Count Ratio, yaitu proporsi penduduk yang mempunyai konsumsi kalori kurang dari standar kecukupan kalori nasional (*Undernourished*)
- G : Food Gap, yaitu proporsi gap antara konsumsi kalori rumah tangga terhadap standar kecukupan kalori nasional. Angka ini diukur dari selisih antara ketersediaan rata-rata energi untuk kelompok penduduk kekurangan pangan dengan rata-rata kebutuhan energi.
- P : Ukuran ketimpangan pada distribusi *food gap*
- S : Koefisien variasi dari konsumsi kalori rumah tangga

Nilai AHFSI berkisar antara 0 dan 100, di mana semakin tinggi nilai AHFSI menggambarkan semakin tinggi tingkat ketahanan pangan.

Menurut FAO, 1994 dalam Soetrisno, 1995, Indeks Rata-Rata Ketahanan Pangan Rumah tangga (AHFSI) menurut status ketahanan pangan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut :

- a. Sangat Tahan (AHFSI Tinggi di atas 85)
- b. Tahan (AHFSI Menengah antara 75 -85);
- c. Tidak Tahan (AHFSI Rendah antara 65 -75)
- d. Sangat Rawan/Kritis (AHFSI Sangat Rendah dibawah 65)

### **Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Rumah tangga Di Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Ketahanan Pangan Pendekatan Pangsa Pengeluaran Pangan**

Pada komoditas pangan, peningkatan pendapatan tidak diikuti dengan peningkatan

permintaan yang progresif. Berdasarkan hal tersebut dan dengan asumsi harga pangan yang dibayar rumah tangga adalah sama, maka menurut Hukum Engel pangsa pengeluaran pangan terhadap pengeluaran rumah tangga akan semakin berkurang dengan meningkatnya pendapatan (Deaton dan Muellbauer, 1980). Kesejahteraan yang meningkatnya kesejahteraan selanjutnya akan berimplikasi pada meningkatnya konsumsi pangan individu karena daya beli terhadap pangan makin meningkat. Dalam teori kesejahteraan, kurva indifferen individu dapat diangkat menjadi kurva indifferen masyarakat, sehingga jika kesejahteraan individu meningkat maka kesejahteraan masyarakat (lokal, regional dan nasional) juga akan meningkat. Dengan demikian ada hubungan antara pangsa pengeluaran pangan dan ketahanan pangan.

Hubungan antara pangsa pangan dengan tingkat pendapatan terlihat pada Tabel 2 dibawah ini, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan (dalam hal ini didekati dengan pengeluaran) maka pangsa pangan cenderung semakin rendah. Kondisi ini tidak lepas dari hukum Engel yang telah dijelaskan sebelumnya. Pangsa pangan cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Fenomena ini bisa dijelaskan bahwa tingkat pendapatan masyarakat perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perdesaan sehingga sesuai hukum Engel proporsi pengeluaran makanan (pangan) di daerah perkotaan akan cenderung lebih rendah. Hal ini sebagaimana dikemukakan di atas mengindikasikan bahwa tingkat ketahanan pangan daerah perkotaan cenderung lebih baik dibandingkan daerah perdesaan.

Tabel 2. Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Tipe Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015 (persen)

Kelompok Pengeluaran	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
40 persen terendah	60,11	61,15	59,37
40 persen menengah	48,72	54,57	50,03
20 tertinggi	38,20	38,96	34,77
<b>Total</b>	47,18	49,92	48,98

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, pangsa pangan cenderung menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat khususnya pendapatan (akses secara ekonomi terhadap pangan). Sedangkan konsumsi energi dan protein lebih menggambarkan ketersediaan pangan secara fisik dalam jumlah yang cukup untuk dikonsumsi (akses secara fisik terhadap pangan). Karena itu, Maxwell dan Frankenberger (1992) menggabungkan pangsa pangan dan kecukupan energi untuk mengklasifikasikan ketahanan pangan rumah tangga menjadi empat kategori yaitu tahan pangan, rentan pangan, kurang pangan dan rawan pangan. Batasan yang digunakan adalah 80 persen dari standar kecukupan energi dikombinasikan dengan pangsa pengeluaran pangan 60 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga yang mempunyai pangsa pangan 60 persen ke bawah dan kecukupan energi di atas 80 persen dikategorikan rumah tangga **tahan pangan**, jika pangsa pangan di atas 60 persen dan konsumsi

energi di atas 80 persen dikategorikan **rentan pangan**, jika pangsa pangan 60 persen ke bawah dan kecukupan energi 80 persen ke bawah dikategorikan **kurang pangan** serta rumah tangga yang mempunyai pangsa pangan di atas 60 persen dan kecukupan energi 80 persen ke bawah dikategorikan **rawan pangan**.

Rumah tangga tahan pangan memiliki kemampuan untuk mencukupi konsumsi energi selain karena mempunyai akses yang tinggi secara ekonomi juga memiliki akses secara fisik. Rumah tangga yang rentan pangan mempunyai kondisi di mana terpenuhi standar kecukupan energi dalam rumah tangga namun pendapatan rumah tangga relatif rendah sehingga berpotensi menjadi kekurangan pangan (akses ekonomi yang rendah). Sedangkan dengan kondisi kurang pangan mempunyai akses secara ekonomi tetapi mempunyai akses yang rendah secara fisik terhadap pangan. Rumah tangga rawan pangan mempunyai akses yang rendah terhadap pangan baik secara fisik maupun secara ekonomi.

Tabel 3. Persentase Rumah tangga Menurut Kategori Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 (Pendekatan Pangsa Pangan dan Kecukupan Energi)

Kecukupan Energi	Pangsa pangan					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	< 60 Persen	>= 60 Persen	< 60 Persen	>= 60 Persen	< 60 Persen	>= 60 Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
> 80 Persen	Tahan Pangan: N = 30.221 % = 51,50	Rentan Pangan: N = 8.161 % = 13,91	Tahan Pangan: N = 56.967 % = 47,17	Rentan Pangan: N = 25.023 % = 20,72	Tahan Pangan: N = 87.188 % = 48,59	Rentan Pangan: N = 33.184 % = 18,49
<= 80 Persen	Kurang Pangan: N = 13.772 % = 23,47	Rawan Pangan: N = 6.528 % = 11,12	Kurang Pangan: N = 17.228 % = 14,27	Rawan Pangan: N = 21.540 % = 17,84	Kurang Pangan: N = 31.001 % = 17,28	Rawan Pangan: N = 28.068 % = 15,64

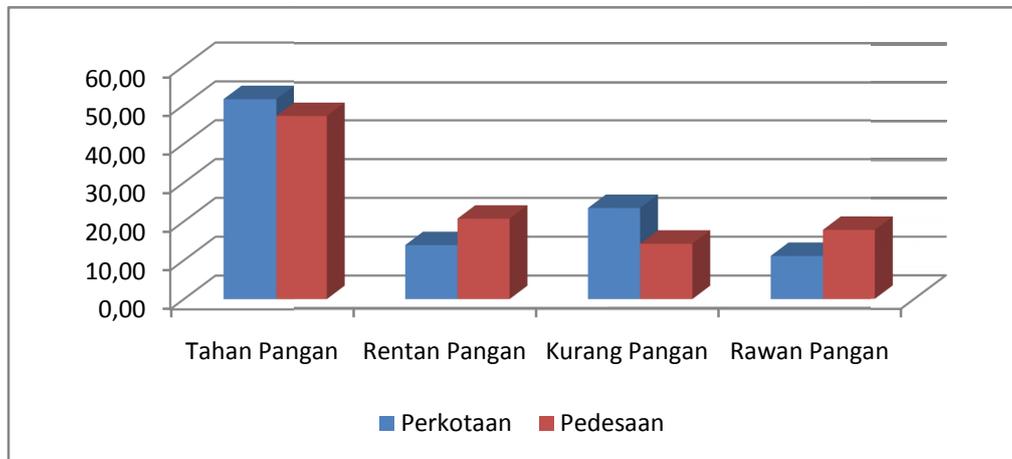
Sumber: BPS, diolah dari Susenas 2015

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka rumah tangga di Kutai Kartanegara pada tahun 2015 terkategori sebagai berikut: 48,59 persen adalah rumah tangga tahan pangan yaitu rumah tangga yang memiliki kemampuan untuk memenuhi konsumsi energi baik secara fisik maupun secara ekonomi, 18,49 persen rumah tangga rentan pangan yaitu rumah tangga yang memiliki akses secara fisik tetapi mempunyai akses yang rendah secara ekonomi, 1,28 persen rumah tangga kurang pangan artinya memiliki akses yang cukup secara ekonomi tetapi

mempunyai akses fisik yang rendah serta 15,64 persen rumah tangga rawan pangan yaitu rumah tangga yang memiliki akses fisik maupun akses ekonomi yang rendah terhadap pangan yang mencukupi. Pada Gambar 1 bahwa persentase rumah tangga tahan pangan di perkotaan yang tahan pangan lebih besar dibandingkan daerah pedesaan, demikian sebaliknya rumah tangga yang rawan pangan di pedesaan lebih besar dibandingkan perkotaan. Hal ini disebabkan karena rumah tangga di perkotaan memiliki

akses fisik maupun akses ekonomi yang relatif baik dibandingkan rumah tangga di pedesaan.

Gambar 1. Persentase Rumah tangga Menurut Kategori Ketahanan Pangan dan Tipe Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015(persen)



Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Patut dicatat di sini sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa, ketersediaan pangan di tingkat daerah misalnya karena adanya produksi pangan yang cukup belum tentu menjamin kondisi ketahanan pangan yang baik di tingkat rumah tangga.

Hal ini disebabkan selain ketersediaan pangan di tingkat daerah, ketahanan pangan tingkat rumah tangga ditentukan juga oleh akses fisik terhadap pangan dalam hal ini berkaitan dengan distribusi pangan yang merata serta adanya akses ekonomi yaitu tersedianya pendapatan yang cukup bagi rumah tangga untuk membeli pangan sesuai standar kecukupan gizi.

Walaupun pangan tersedia pada suatu Daerah, jika tidak dapat diakses masyarakat maka kinerjanya rendah.

#### **Ketahanan Pangan Pendekatan *Aggregate Household Food Security Index (AHFSI)***

AHFSI memberikan ukuran mengenai kondisi ketahanan tingkat rumah tangga di suatu Daerah berdasarkan konsumsi energi. Karena indeks ini hanya mencakup salah satu aspek dari ketahanan pangan yaitu konsumsi energi maka ukuran ini lebih mencerminkan tingkat kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai standar kecukupan gizi dalam hal ini kualitas konsumsi rumah tangga. Indeks ini mempunyai nilai antara 0 dan 100, di mana semakin tinggi ketahanan pangan tingkat rumah tangga suatu Daerah maka nilai indeks akan semakin mendekati 100, sebaliknya semakin rendah derajat ketahanan pangan maka nilai indeks akan semakin mendekati 0.

Tabel 4. AHFSI dan Indikator Untuk Penghitungan AHFSI di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015

Kelompok Pengeluaran	Perkotaan	Pedesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Batas Kecukupan Kalori	2000	2000	2000
<i>H</i>	0,7277	0,7354	0,7329
<i>G</i>	0,2308	0,2174	0,2218
<i>P</i>	0,1452	0,1425	0,1437
<i>Mean</i>	1.756,9300	1.791,154 3	1.779,8429
<i>Std Dev.</i>	463,4800	466,3800	465,7022
<i>S</i>	0,2638	0,2604	0,2617
<b>AHFSI</b>	<b>65,17</b>	<b>65,94</b>	<b>65,67</b>

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Tabel 4 dan Gambar 2 menyajikan indikator AHFSI Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 yang dibedakan menurut perkotaan dan pedesaan. Besarnya indeks AHFSI untuk tahun 2015 adalah 65,67, dimana di perkotaan mencapai 65,17 dan di pedesaan mencapai 65,94.

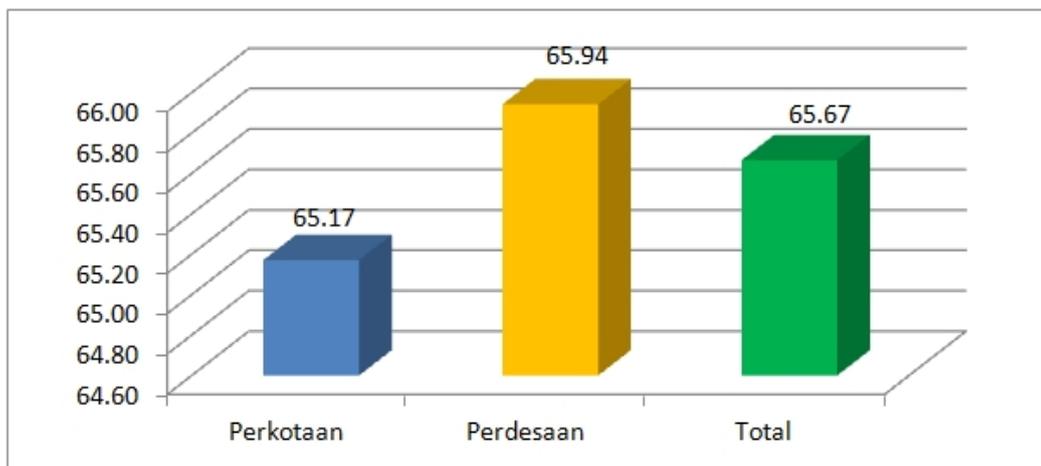
Hal ini berarti dari sisi konsumsi energi rumah tangga secara rata-rata ketahanan pangan rumah tangga di perkotaan maupun di pedesaan relatif tidak jauh berbeda. Karena AHFSI berkisar antara 65 – 75, maka rumah tangga di Kutai Kartanegara secara rata-rata termasuk

dalam kategori AHFSI rendah (tidak tahan), baik diperkotaan maupun perdesaan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan bahan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat produksinya mengalami penurunan, terutama komoditas padi sawah dan padi ladang. Untuk komoditas Padi Sawah tahun 2013 produksinya mencapai 189.393 ton, 180.811 ton pada tahun 2014 dan terus menurun pada tahun 2015 sebesar 173.848 ton. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya luas panen padi sawah dari 35.433 hektar pada 2014 menjadi 34.002 hektar pada 2015 (Statistik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016). Hal yang sama juga terjadi pada komoditas padi ladang. Luas panen padi ladang menurun dari 4.246 hektar menjadi 4000 hektar. Secara umum,

di tahun 2015 produksi dari seluruh komoditas tanaman palawija mengalami penurunan. Ubi kayu mengalami penurunan produksi sebesar 6,70 persen, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau juga mengalami penurunan (Statistik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016)

Berdasarkan Gambar 2 memperlihatkan bahwa AHFSI pada tahun 2015 di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini sejalan dengan lebih tingginya rata-rata konsumsi energi untuk daerah perdesaan (1.791,15 perkapita perhari) dibandingkan perkotaan (1.756,93 perkapita perhari) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Gambar 2. Indeks Ketahanan Pangan Agregat Tingkat Rumah tangga (AHFSI) Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015



Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Tingginya nilai AHFSI dan rata-rata konsumsi energi di perdesaan dibandingkan perkotaan dapat dijelaskan bahwa pada tingkat pendapatan tertentu, rumah tangga akan memprioritaskan pada pangan dengan harga murah seperti pangan sumber energi, kemudian dengan semakin meningkatnya pendapatan, akan terjadi perubahan preferensi konsumsi yaitu dari pangan dengan harga murah beralih ke pangan yang harganya mahal seperti pangan sumber protein. Di daerah perdesaan, pendapatan masyarakat cenderung lebih rendah (Tabel 5) sehingga pilihan konsumsi lebih diprioritaskan pada pangan dengan harga murah sebagai sumber energi khususnya padi-padian seperti ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 5. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Kartanegara, 2013-2015 (Rp/Kapita /Bulan)

Tipe Daerah	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	994.738	980.664	1.027.072
Perdesaan	775.863	837.073	970.202
Total	847.318	884.205	988.996

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2016

Tabel 6: Distribusi Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan untuk Kelompok Makanan Menurut Kelompok Barang dan Tipe Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015 (persen)

No	Kelompok Barang	Perkotaan	Pedesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi-padian	12,06	14,45	13,64
2	Umbi-umbian	0,62	1,02	0,89
3	Ikan	11,84	12,23	12,10
4	Daging	4,75	3,72	4,07
5	Telur dan susu	9,73	6,73	7,75
6	Sayur-sayuran	6,73	7,01	6,91
7	Kacang-kacangan	1,92	1,74	1,80
8	Buah-buahan	5,46	5,33	5,37
9	Minyak dan lemak	3,47	3,04	3,19
10	Bahan minuman	3,34	3,50	3,45
11	Bumbu-bumbuan	2,46	2,19	2,28
12	Konsumsi Lainnya	2,11	1,89	1,97
13	Makanan dan minuman jadi	24,32	22,77	23,29
14	Tembakau dan sirih	11,20	14,37	13,30
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

### Kesimpulan

1. Rumah tangga di Kutai Kartanegara pada tahun 2015 terkategori sebagai berikut: 48,59 persen adalah rumah tangga tahan pangan yaitu rumah tangga yang memiliki kemampuan untuk memenuhi konsumsi energi baik secara fisik maupun secara ekonomi, 18,49 persen rumah tangga rentan pangan yaitu rumah tangga yang memiliki akses secara fisik tetapi mempunyai akses yang rendah secara ekonomi, 1,28 persen rumah tangga kurang pangan artinya memiliki akses yang cukup secara ekonomi tetapi mempunyai akses fisik yang rendah serta 15,64 persen rumah tangga rawan pangan yaitu rumah tangga yang memiliki akses fisik maupun akses ekonomi yang rendah terhadap pangan yang mencukupi.
2. Persentase rumah tangga tahan pangan di perkotaan yang tahan pangan lebih besar

- dibandingkan daerah pedesaan, demikian sebaliknya rumah tangga yang rawan pangan di pedesaan lebih besar dibandingkan perkotaan. Hal ini disebabkan karena rumah tangga di perkotaan memiliki akses fisik maupun akses ekonomi yang relatif baik dibandingkan rumah tangga di pedesaan.
3. Indikator AHFSI Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 dibedakan menurut perkotaan dan pedesaan. Besarnya indeks AHFSI untuk tahun 2015 adalah 65,67, dimana di perkotaan mencapai 65,17 dan di pedesaan mencapai 65,94. Hal ini berarti dari sisi konsumsi energi rumah tangga secara rata-rata ketahanan pangan rumah tangga di perkotaan maupun di pedesaan relatif tidak jauh berbeda. Karena AHFSI berkisar antara 65 – 75, maka rumah tangga di Kutai Kartanegara secara rata-rata termasuk dalam

kategori AHFSI rendah (tidak tahan), baik diperkotaan maupun perdesaan.

### Saran

1. Penguatan ketersediaan pangan di tingkat regional Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai prasyarat ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga perlu ditingkatkan melalui program-program pemerintah untuk terus mengembangkan pertanian dalam arti luas khususnya mewujudkan swasembada pangan yang harus terus digalakkan. Hal ini disebabkan karena mayoritas rumah tangga tidak tahan pangan. Kebijakan pendukung yang diperlukan untuk mewujudkan berbagai upaya tersebut adalah investasi yang cukup besar di sektor pertanian pangan, mulai dari prasarana, penciptaan inovasi teknologi dan diseminasinya, sampai pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian pangan.
2. Program bantuan sosial dan jaring pengaman sosial menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung rumah tangga miskin dalam mendapatkan akses pangan yang memadai dalam jangka pendek.
3. Berbagai kebijakan pendukung yang dapat dilakukan untuk penguatan ketahanan pangan rumah tangga antara lain; pemerintah hendaknya memberikan modal dan akses layanan kredit bagi usaha ekonomi produktif serta pelatihan kewirausahaan dengan mengembangkan kearifan lokal khas Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad *et al.* 2004. Estimation of Food Security Situation at Household Level in Rural Areas of Punjab. *International Journal of Agriculture*. Vol 6, No 3:483-487
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009b. *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi*. Jakarta (ID): BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2007b. *Pola Konsumsi Penduduk Indonesia 2007*. Jakarta (ID): BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008a. *Konsep dan Definisi Susenas Juli 2008*. Jakarta (ID): BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008b. *Pedoman Kor Susenas Juli 2008*. Jakarta (ID): BPS.
- [BPS Kukar] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. 2016. *Kukar Dalam Angka 2016*. Kukar (ID): BPS Kukar.
- Deaton A, J Muellbauer. 1980. An Almost Ideal Demand System. *The American Economic Review* 70 (3):312:326
- Deaton A, Muellbauer J. 1980. An almost ideal demand system. *The American Economic Review*. 70(3):312-326.
- E Afshoon et al . 2016. Food Security Analysis in Kohgiluyehand Boyer-Ahmad Province Case Study: Households. *Journal of Fundamental and Applied Sciences*. 8(3S), 2734-2743
- FAO. 2011a. *FAO in the 21st Century, Ensuring Food Security in a Changing World*. Rome. FAO. 2011b. *Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention*. Rome.
- Kementerian Pertanian. 2010. *Rencana Strategis. Kementerian. Pertanian 2010-2014 (Permentan Nomor 15 Tahun 2010)*. Jakarta
- Nainupu AE, Widodo T. 2013. *Kerawanan Pangan Pada Tingkat Rumah Tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2008 dan 2011*. Program Pascasarjana Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Pujoharso, Cahyo. 2013. *Aplikasi Teori Konsumsi Keynes Terhadap Pola Konsumsi Makan Masyarakat Indonesia*. Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Purwaningsih, Yunastiti, et al. 2008. *Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. Vol. 9 No.1 Hal 1-27.

- Suryana, A. 2013b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disampaikan dalam Kuliah Umum Mahasiswa Sarjana dan Pasca Sarjana Jurusan Agribisnis IPB. 14 Desember 2013. Bogor
- Suryana, A. 2014b. Kebijakan Cetak Biru Ketahanan Pangan Nasional. Disampaikan dalam Diskusi Komite Ekonomi Nasional (KEN). 4 Februari 2014. Jakarta.
- Suryana A. 2014. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. Forum Penelitian Agroekonomi. Volume 32 No.2:123-135
- Kahar M. 2010. Analisis pola konsumsi daerah perkotaan dan perdesaan serta keterkaitannya dengan karakteristik sosial ekonomi di Propinsi Banten [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Mubyarto. 1994. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Edisi I. Jakarta : LP3ES.